

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Data Inflasi Kota Yogyakarta 2025 (M to M)

Wilayah Inflasi	Oktober	November	Desember
Kota Yogyakarta	0,59%	0,23%	0,53%
Nasional	0,28%	0,17%	0,64%

Data Inflasi Kota Yogyakarta 2025 (Y o Y)

Wilayah Inflasi	Oktober	November	Desember
Kota Yogyakarta	3,25%	3,27%	3,33%
Nasional	2,86%	2,72%	2,92%

- Pada Oktober 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Yogyakarta sebesar 3,25 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,41 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,86 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,83 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,31 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,02 persen; kelompok transportasi sebesar 1,11 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,95 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,92 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,34 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 19,17 persen.
- Pada November 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Yogyakarta sebesar 3,27 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,75 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,86 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,23 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,91 persen; kelompok transportasi sebesar 1,14 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,01 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,89 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,05 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 18,43 persen.
- Pada Desember 2025, inflasi year on year (y-on-y) Kota Yogyakarta tercatat sebesar 3,33 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,64 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,67 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,63 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,31 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,98 persen; kelompok transportasi sebesar 1,29 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,00 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,89 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,85 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 20,23 persen.

persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Harga komoditas emas perhiasan yang terus mengalami kenaikan memberikan andil inflasi terbesar di Kota Yogyakarta.
- Salah satu penyebab kenaikan harga beras adalah naiknya harga gabah di tingkat petani. Untuk memenuhi kebutuhan beras di Kota Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta telah melaksanakan KAD dengan Pemkab Bantul. Namun pelaksanaan KAD ini juga terkendala dengan tingginya harga gabah di petani Bantul, sehingga turut mempengaruhi daya saing beras Bantul yang akan dipasok ke Kota Yogyakarta. Di samping itu, kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada tidak adanya subsidi biaya distribusi untuk komoditas beras dimaksud.
- Komoditas cabe rawit dan bawang merah mengalami kenaikan harga signifikan pada periode awal hingga pertengahan Desember 2025. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya pasokan dari daerah sentra akibat faktor cuaca (curah hujan tinggi).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Antardaerah (KAD) Pengendalian Inflasi antara Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Bantul pada tanggal 16 Oktober 2025. Adapun saat ini KAD yang sudah terlaksana yaitu komoditas beras dan cabe. Di samping itu, pada rapat juga turut dibahas evaluasi terhadap kualitas komoditas dan kuantitas transaksi.
- Pemerintah Kota Yogyakarta turut menghadiri HLM TPID DIY pada tanggal 11 November 2025, sebagai persiapan menghadapi HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Kabupaten/Kota se-DIY.
- Dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kota Yogyakarta menyelenggarakan Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok Bersubsidi di 14 Kemantren Kota Yogyakarta pada tanggal 17 November - 05 Desember 2025. Pelaksanaan Pasar Murah ini terlaksana dengan dukungan APBD Kota Yogyakarta TA 2025 melalui mekanisme pemberian subsidi biaya distribusi.
- Sebagai upaya sinergi dan koordinasi menjelang HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan HLM TPID Kota Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2025. HLM dimaksud juga merupakan tindak lanjut dari kegiatan HLM TPID DIY.
- Kegiatan Launching Pengembangan Warung Mrantasi pada tanggal 3 Desember 2025. Program Warung Mrantasi merupakan aktualisasi dari sebuah kesadaran serta kesanggupan pedagang pasar untuk bersama-sama tanggap dan peduli terhadap inflasi. Hal tersebut dikarenakan Pedagang pasar memiliki jaringan distribusi luas yang langsung menjangkau konsumen akhir, Pedagang pasar memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap perubahan harga dan permintaan pasar, pedagang berperan sebagai pembentuk harga, dan sebagai sumber informasi harga.
- Menindaklanjuti HLM TPID Kota Yogyakarta, dilaksanakan kegiatan pemantauan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Beringharjo dan Gudang Toko Swalayan Indomarco Prisma pada tanggal 9 Desember 2025. Pemantauan tersebut dilakukan untuk

memastikan ketersediaan pasokan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok khususnya menjelang HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

- Selain pemantauan harga dan pasokan terhadap barang kebutuhan pokok, Pemkot Yogyakarta turut melakukan pemantauan harga dan pasokan barang penting, khususnya LPG Bersubsidi dan BBM. Pemantauan dilakukan di Agen LPG PT Wina Wira Usaha Jaya dan SPBU Yogyakarta Cokroaminoto, tanggal 24 Desember 2025.
- Dalam rangka keterbukaan informasi, dilakukan update harga barang kebutuhan pokok di aplikasi JSS. Di samping itu, turut dilakukan kegiatan Peliputan, Jumpa Pers wartawan, release berita ke media cetak, media elektronik dan media sosial. Dokumentasi kegiatan tersebut dapat diakses pada tautan:

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/44530;>

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/44687/pemkot-yogyakarta-gelar-pasar-murah-di-14-ke-mantren-jelang-nataru-2025-11-17;>

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/45060;>

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/45106;>

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/45202;>

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/45549>

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Perdagangan akan melaksanakan kegiatan Operasi Pasar pada periode November-Desember 2025. Komoditas beras dari Kabupaten Bantul berpotensi menjadi pemasok pada kegiatan dimaksud, sebagai implementasi dari KAD pengendalian inflasi.
- Guna mengantisipasi dampak kenaikan harga cabe rawit, Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengoptimalkan Gerakan Menanam melalui Program Pekarangan Pangan Lestari dan Rumah Bibit. Salah satu jenis benih yang diberikan kepada masyarakat adalah cabe, agar dapat dibudidayakan dan mendukung pemenuhan kebutuhan komoditas cabe secara mandiri.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Terus dilakukan pemantauan harga dan pasokan barang baik dilakukan sendiri oleh TPID Kota Yogyakarta maupun bersama-sama TPID Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dilakukan pemetaan potensi dari masing-masing Kabupaten/Kota untuk peninjauan kerja sama antar daerah baik antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta atau di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.